



**BADAN KEAHLIAN  
DPR RI**  
*Bridging research to parliament  
Evidence based policy making*

## PEMBERDAYAAN WARGA BINAAN DALAM MENDUKUNG PROGRAM KETAHANAN PANGAN

**Harris Yonatan Parmahan Sibuea**  
Analisis Legislatif Ahli Madya  
[harris.sibuea@dpr.go.id](mailto:harris.sibuea@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Pemberdayaan warga binaan pemasyarakatan (WBP) di sejumlah rumah tahanan (Rutan) dan lembaga permasyarakatan (Lapas) dalam mendukung ketahanan pangan menjadi salah satu program dari 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas). Program ketahanan pangan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan internal Rutan dan Lapas, namun juga sebagai sarana bagi warga binaan untuk belajar dan mengembangkan keterampilan. Dalam mewujudkan program ketahanan pangan tersebut, Menteri Imipas, Agus Andrianto berencana akan melaksanakan proyek ketahanan pangan nasional di Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah. Nusakambangan dinilai bukan sekedar pulau otoritas pengasingan, namun juga dapat dimanfaatkan sebagai pusat produksi pangan yang strategis. Saat ini sekitar 115 hektar lahan di Nusakambangan tengah dioptimalkan untuk pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Sektor pertanian dan perkebunan ditargetkan menjadi lumbung padi dan jagung dengan lahan seluas 72 hektar.

Pemberdayaan warga binaan pada Rutan dan Lapas berupa program pembinaan kemandirian diarahkan untuk pembinaan bakat dan keterampilan agar narapidana dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Pembinaan kemandirian bertujuan untuk meningkatkan kemampuan narapidana untuk mencari penghidupan melalui kegiatan bimbingan kerja. Pembinaan kemandirian dapat dilakukan warga binaan melalui program keterampilan seperti program keterampilan bidang pertukangan, perbengkelan, perikanan, peternakan, dan pertanian.

Pelaksanaan program pembinaan kemandirian bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan di Lapas dan Rutan secara tidak langsung memberikan solusi atas permasalahan dalam memenuhi ketahanan pangan warga binaan. Dalam upaya meningkatkan produktivitas warga binaan di bidang ketahanan pangan, telah disusun beberapa strategi di antaranya: *pertama*, pertanian, budidaya berbagai jenis sayuran, seperti pakcoy dan kangkung, yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan internal maupun eksternal. *Kedua*, peternakan, pemeliharaan ayam petelur dan ayam pedaging sebagai upaya memenuhi kebutuhan protein serta membuka peluang usaha bagi warga binaan pasca-pembebasan. *Ketiga*, perikanan, budidaya ikan air tawar, khususnya lele, guna meningkatkan keterampilan warga binaan dalam sektor perikanan yang memiliki prospek ekonomi menjanjikan. Upaya tersebut sejalan dengan 13 Program Akselerasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan serta Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Selain itu, koordinasi yang kuat antara berbagai seksi di Lapas sangat diperlukan dalam upaya menjalankan program ini secara efektif.

Terkait pemberdayaan warga binaan dalam mendukung program ketahanan pangan, beberapa Lapas telah melaksanakan program pembinaan kemandirian di bidang perikanan, peternakan, pertanian, seperti Lapas Kelas IIB Batang, melaksanakan kegiatan panen kangkung di lahan pertanian yang berada di area brandgang. Kegiatan tersebut dilakukan oleh staf Giatja Lapas Batang bersama para WBP sebagai bagian dari program pembinaan kemandirian.

Lapas Kelas IIA Kendari juga melaksanakan kegiatan ketahanan pangan sebagai bagian dari program pembinaan kemandirian warga binaan. Program pembinaan kemandirian bidang pertanian dan perkebunan terlaksana di lahan 1,4 hektar Lapas Kelas IIA Kendari berupa penanaman jagung, sawi, terong, dan tomat.

## Atensi DPR

Pemberdayaan warga binaan di sejumlah Rutan dan Lapas dalam mendukung ketahanan pangan secara tidak langsung memberikan solusi atas permasalahan dalam memenuhi ketahanan pangan warga binaan. Untuk itu, koordinasi yang kuat antara berbagai seksi di Lapas sangat diperlukan dalam upaya menjalankan program tersebut secara efektif. DPR RI melalui Komisi XIII, dalam pelaksanaan fungsi pengawasan mendukung program Menteri Imipas dalam pemberdayaan warga binaan melalui program pembinaan kemandirian di bidang perikanan, peternakan, dan pertanian dalam upaya meningkatkan keterampilan warga binaan guna mendukung ketahanan pangan. Selain itu, Komisi XIII DPR RI perlu mendorong koordinasi antara berbagai seksi di Lapas dan Rutan dengan instansi atau lembaga terkait lainnya dalam mendukung pelaksanaan program ketahanan pangan. Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, Komisi XIII DPR RI dapat mendorong pengalokasian anggaran yang memadai melalui Kementerian Imipas untuk pemberdayaan warga binaan dan memastikan penyediaan anggaran yang sesuai dengan jumlah warga binaan yang berada di Lapas dan Rutan.

## Sumber

kompasiana.com, 12 Februari 2025;  
kompas.tv, 7 Februari 2025;  
sippn.menpan.go.id, 5 Februari 2025; dan  
sultra.antaranews.com, 7 Februari 2025.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## EDITOR

### Polhukam

Ahmad Budiman  
Prayudi  
Rachmi Suprihartanti S.  
Novianti

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Mandala Harefa  
Ari Muliarta Ginting  
Eka Budiyantri  
Venti Eka Satya  
Teddy Prasetiawan

### Kesra

Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola  
Yulia Indahri

## LAYOUTER

Devindra Ramkas O.  
Ully Ngesti Pratiwi  
Desty Bulandari  
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.  
Ulayya Sarfina  
Yosephus Mainake  
M. Z. Emir Zanggi  
Muhammad Insan F.  
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.  
Nur Sholikah P. S.  
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament  
Evidence Based Policy Making*